

MODEL KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

Oleh : Ardiyan Saptawan, Muhammad Ammar, dan Retno Susilowati
Dosen Fisip Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

The existence of suburban communities spreads until in the interior of the forests, so that the Government is strategically difficult to carry out directly. The forest community empowerment model which is part of the village development policy strategy that has been carried out in Ogan Komering Ilir Regency includes two schemes, are: the district government scheme and the company scheme through the obligation to carry out CSR programs. Both of these policies run independently may not to achieve the target of increasing welfare significantly. The effectiveness of the community development model around the forest should pay attention to the existing conditions of the local area in the modernization paradigm of efforts to achieve integrated development targets. The Synthesis Model is an alternative strategy that is in line with the characteristics of the Indonesian National Development System because it combines the Top-down model with Bottom up so that the National Development System will contain a system of local development in synchronic and harmonious direction towards the achievement of national development that pays attention to local wisdom.

Key words: communities empowerment policy, cooperation program model, effectiveness.

I. PENDAHULUAN

Sebagian besar mata pencaharian penduduk di pedesaan di Indonesia adalah di sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini mendorong sering terjadinya perluasan lahan baru untuk perkebunan baik sebagai lahan untuk petani individual maupun untuk perusahaan perkebunan. Perluasan lahan baru ini pada dasarnya mempunyai dampak yang positif karena banyak lahan tidur di Indonesia yang belum dimanfaatkan sebagai lahan produksi. Namun semakin luasnya persebaran lahan berarti juga terjadi persebaran masyarakat semakin luas. Hal ini paradox dengan jangkauan layanan pemerintah yang terbatas.

Hasil penelitian Ardiyan Saptawan, Muhammad Ammar, dan Retno Susilowati tahun 2018 di Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan bahwa meskipun beberapa gaya kebijakan pembangunan telah digunakan oleh Pemerintah, namun tingkat kesejahteraan masyarakat desa masih jauh tertinggal dengan tingkat kesejahteraan masyarakat kota. Hal tersebut berarti bahwa model kebijakan pembangunan desa yang diupayakan selama ini belum efektif. Kemampuan pemerintah

yang terbatas untuk menjangkau daerah pedesaan terutama masyarakat di sekitar hutan merupakan suatu tantangan yang berat.

Wilayah Ogan Komering Ilir yang merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Selatan yaitu 21.689,54 Km² meliputi 18 kecamatan dan 321 desa/kelurahan terdiri dari 308 desa dan 13 kelurahan dengan kepadatan penduduknya 1.568 jiwa/Km². Selain kepemilikan individual seluruh lahannya diolah oleh perusahaan memiliki izin penggarapan yaitu izin penggunaan lahan yang dikelola oleh perusahaan berupa konsensi. Perusahaan-perusahaan tersebut dimiliki oleh swasta di bawah pengawasan dan supervisi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan secara langsung. Lahan-lahan tersebut sebagian besar ditanami komoditi karet yaitu seluas 181.463 ha, kemudian kelapa sawit seluas 12.675 ha, dan disusul perkebunan kelapa seluas 3.998 ha. Dengan demikian posisi keberadaan masyarakat di sekitar hutan semakin meluas. Masyarakat sekitar hutan menjadi suatu komponen yang bertambah penting untuk diperhatikan dalam pemerataan

pembangunan. Selain itu juga interaksi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah merupakan suatu komponen yang penting dan berpengaruh dalam mencapai kesuksesan upaya peningkatan capaian kesejahteraan.

Pemerintah dan perusahaan belum memiliki kebijakan yang terkait secara formal dalam suatu skema resmi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tersebut. Pemerintah melalui program pembangunan pemerintahan desa merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD, sedangkan kebijakan perusahaan yang terkait dengan masyarakat sekitar area bisnisnya adalah memanfaatkan Program CSR sebagaimana diwajibkan oleh Pemerintah. Bentuk program kebijakan pemerintah adalah memadukan antara aspirasi rakyat melalui musrenbang dengan rencana program pembangunan wilayah dari pemerintah secara struktural (top down). Bentuk program CSR dari perusahaan swasta terkait bersifat *charity*. Penyelenggaraan kebijakan tersebut berjalan sendiri-sendiri meskipun unit sasaran programnya adalah sama yaitu masyarakat di sekitar hutan. Karena itu perlu dicari model pemberdayaan yang efektif melalui kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan swasta dalam rangka meningkatkan keefektifan pembangunan masyarakat di wilayah sekitar hutan.

II. STUDI PUSTAKA

Model pembangunan masyarakat desa selama ini berupaya untuk memperkuat kemampuan masyarakat yang dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai bentuk partisipasi untuk membebaskan diri masyarakat desa dari ketergantungan mental maupun fisik (Ali, 2007). Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara,

melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kesi, 2011). Dalam prakteknya, upaya ini cenderung disamakan antara masyarakat desa secara umum di pinggiran kota dengan masyarakat desa yang berada jauh dari perkotaan, baik di perbatasan maupun di pinggir hutan. Pemerintah sudah mengupayakan model pembangunan yang bersifat struktural seperti program pembangunan desa tertinggal dan dana desa serta juga mendorong perusahaan yang beroperasi di dekat desa untuk menyalurkan dana CSR nya berbentuk upaya pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat pinggiran yang mengandung karakteristik yang heterogen karena banyak melibatkan banyak variabel lingkungan menyebabkan sampai saat ini belum ada model ideal yang efektif sebagai model acuan model pembangunan yang utama untuk pembangunan di Indonesia. Pembangunan adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan seperti di Kalimantan Tengah pada tahun 2007 oleh Cornelis Ley menunjukkan bahwa hasil pembangunan fisik yang dilakukan yaitu dengan membangun jalur kereta api tidak menunjukkan efek bagi peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Saptawan dkk (2017) menunjukkan bahwa model alternatif strategi kebijakan pengendalian pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang merupakan salah satu cara memberdayakan masyarakat memerlukan kerjasama antara pemerintah dan swasta sebaiknya diarahkan juga kepada kesiapan masyarakat di sekitar hutan.

Kartasmita (1997) mengatakan bahwa upaya pendekatan pemberdayaan masyarakat selayaknya:

- 1) Harus terarah.
- 2) Mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
- 3) Menggunakan pendekatan kelompok.
- 4) Menggunakan pendekatan kelompok.

Karena itu dalam memberdayakan masya-rakat memiliki 3 sisi yaitu :

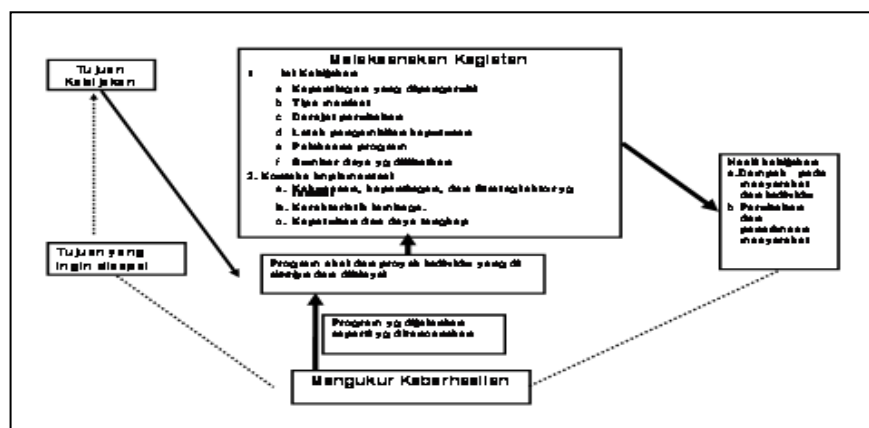
- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).
- 3) Melindungi masyarakat.

Siklus pemberdayaan masyarakat ber-arti merupakan proses upaya individu dan sekelompok anggota masyarakat (komuni-tas) untuk mengikuti target prestasi tertentu yang dimaknai sebagai antara lain (Jemadi, 2013) :

- 1) Keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik.
- 2) Masyarakat diharapkan mampu melepas-kan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kema-juan dalam dirinya dan komunitasnya.
- 3) Masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memi-lik tanggung jawab dalam mengem-bangkan dirinya dan komunitasnya.
- 4) Upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggungjawab yang lebih

luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik.

Sesungguhnya pemberdayaan masyara-kat adalah suatu model pembangunan yang mensinergiskan model kebijakan struktural kekuasaan (*top down*) dengan pembangunan berbasisan masyarakat (*community based development*) yang merupakan aplikasi strategi yang berdasarkan kepada upaya mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan dan sosial budaya serta kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dilapangan. Faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor ekstnal peluang dan tantangan dari situasi yang dihadapi harus dirumuskan untuk mendapatkan keadaan nyata (*existing*) yang faktual dalam melihat kemampuan yang utuh. Dengan demikian perlu menginte-grasikan model pendekatan SWOT dengan model pendekatan Kebijakan struktural dari Grindle sebagaimana digambarkannya be-rikut ini :



Gambar 1 Pendekatan Grindle.

Secara umum model kebijakan yang telah dikenal ada tiga yaitu *Model Top-down*, *bottom-up*, dan *Sintesis (hybrid)*. Model *Top-down* menitik beratkan pada sudut pandang pembuat kebijakan bahwa dengan menyediakan prasyarat sukses se-

buah implementasi yang telah dihitung dan dianalisis dengan cermat oleh pembuat kebijakan dan pelaksana tingkat atas (*high level bureaucracy*), maka kebijakan dengan sendirinya akan lebih berhasil dalam implementasinya. Namun demikian,

pendekatan perspektif ini bersifat terbatas pada ruang dan waktu serta permasalahan yang serupa, padahal variasi masalah kebijakan luas dan kompleks dalam ruang dan waktu pemerintahan yang berbeda, sehingga mem-bawa perbedaan pula dalam cara pemecahan masalahnya. Kemampuan sumber daya ma-nusia dan sumber daya alam lokal (setempat) adalah elemen pembentuk karakter warga setempat. Masyarakat hidup dari alam lingkungannya sehingga pengalaman pertama dalam mata pencarian mereka adalah ke-arifan lokal. Karena itu dalam kebijakan pembangunan desa selayaknya model Top-down diikuti oleh model Bottom-up dan model Sintesis.

Model Bottom-up mempertegas bahwa proses politik bukan hanya tidak berhenti saat kebijakan sudah diputuskan, tapi tetap berlangsung pada level pelaksana tingkat bawah yang banyak menentukan tingkat keberhasilan implementasi dengan memper-timbangkan aspirasi, tujuan dan kebutuhan para pelaksana termasuk kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Situasi keadaan se-tempat dapat dicakup dalam pertimbangan kebijakan pembangunan sesuai dengan ke-butuhan dankeinginan masyarakat serta ke-mampuan daya dukung alamnya.

Model Sintesis ini memadukan kedua model sebelumnya (*Top-down dan Bottom up*) dengan tekanan utama yang bisa beragam, mulai pada jaringan interaksi antar aktor pelaksana sampai pada pendekatan sosiologis. Model ini disebut juga model Hybrid. Model hybrid ini menyatakan bahwa tidak ada model perspektif yang bisa diterapkan pada setiap masalah implemen-tasi. Setiap kebijakan memiliki kekhasan tersendiri, sehingga pendekatannya pun harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. Dalam negara kesatuan seperti Indonesia dengan ciri khasnya adalah keseragaman dalam keberagaman (*unity in diversity*) model kebijakan top-down tidak bisa dilepaskan dari Sistem Perencanaan Pem-bangunan

Nasional yang menuntut keseraga-man dengan fleksibilitas terbatas (dekonsentrasi) sebagai wujud pengendalian semangat persatuan dan kesatuan, sedangkan model bottom-up adalah wujud dari semangat (desentralisasi) yang mengemas aspirasi masyarakat untuk pembangunan.

III. METODE PENELITIAN

Metode pendekatanyang digunakan adalah kualitatif, yaitu menggambarkan fenomena yang ada di lapangan, kemudian mengkonfirmasi dengan teori dengan pe-mahaman fenomenologis dan simbolik me-nuju kesimpulan yang komprehensif mem-perhatikan dinamika dan prospek peluang yang lebih baik di masa depan.

Fokus kajiannya adalah tujuan Kebi-jakan,konteks Implementasi (*existing*), prog-ram aksi dan proyek individu yang di *design* dan dibiayai, hasil kebijakan dan dampak pada masyarakat dan individu, serta peru-bahan dan penerimaan masyarakatyang ter-jadi. Unit analisisnya organisasi yaitu Pemkab OKI dan perusahaan terkait dengan program pemberdayaan masyarakat.Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi menge-nai suatu fenomena sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalahdan unit penelitian.

IV. PEMBAHASAN

Model kebijakan pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan

Pemberdayaan masyarakat merupakan metode upaya peningkatan kualitas kehidu-pan yang dilakukan melalui pembangunan fisik dan sosial oleh suatu kelompok ekster-nal. Pengembangan masyarakat sebagai se-buah pendekatan menekankan arti pen-tingnya campur tangan pemerintah (sektor publik) dan partisipasi sektor privat atau swasta dalam mendukung strategi

pengen-tasan kemiskinan berbasis masyarakat.

Metode pengembangan masyarakat ber-fokus pada upaya-upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebu-tuhan bersama, untuk selanjutnya merumus-kan dan merencanakan serta melaksanakan kegiatan bersama guna memenuhi kebutuhan tersebut. Pengembangan masyarakat dalam banyak hal sering di emplementasikan dalam bentuk :

1. Proyek-proyek pembangunan kesejahteraan sosial yang memungkinkan masya-rakat memperoleh dukungan dalam me-menuhi kebutuhannya
2. Kampanye dan aksi sosial yang me-mungkinkan kebutuhan - kebutuhan masyarakat dapat di penuhi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan melibatkan masyarakat setempat.

Dalam penggerakkan pembangunan di tingkat desa pemerintah mengutamakan mo-del kebijakannya berupa upaya pember-dayaan masyarakat. Pemberdayaan Masya-rakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesa-daran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (pasal 1 ayat (12) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa). Cara yang dilakukan untuk menggerakkan pemberdayaan tersebut adalah dengan mengerahkan Pemerintah (Nasional), Peme-rintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk :

- a) menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masya-rakat Desa;

- b) meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan

- c) mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

(Pasal 112 ayat (3) UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Kebijakan pembangunan desa tersebut memanfaatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digu-nakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pember-dayaan masyarakat (Pasal 1 ayat (2) Permen Desa No. 21 Tahun 2015 Tentang Pene-tapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016). Penggunaan dana tersebut diprioritaskan untuk meningkatkan kemam-puan warga masyarakat sehingga mereka dapat mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 Permen Desa No 21 Tahun 2015 sebagai berikut : “Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pela-tihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polin-des dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.”

Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selain perusahaan-perusahaan secara profesional fokus kepada pengembangan usaha mereka, mereka mempunyai kewajiban untuk membangun masyarakat sekitar lokasi usaha mereka melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). CSR adalah suatu tindakan atau program kebijakan perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Melalui CSR perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial didalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan. Bentuk konkrit program CSR ini bermacam-macam tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh

perusahaan yang bersangkutan, mulai dari kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa, pemberiandana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada, dan lain-lain.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan program peningkatan produksi perkebunan bagi masyarakat Kabupaten OKI melalui program bantuan bibit benih karet dan sawit kepada masyarakat yang memiliki perkebunan. Dinas perkebunan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dibantu oleh Manggala Agni Daops III untuk melakukan pelatihan dan pemantauan terhadap program tersebut. Selain melalui bantuan pemerintah, masyarakat mendapatkan bantuan dari perusahaan-perusahaan disekitar lahan masyarakat melalui program CSR perusahaan. Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan mendirikan Masyarakat Peduli Api, yaitu PT. Kelantan Sakti, PT. Rambang Agro, dan PT Gading Cempaka Graha.

Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 88 ayat (1) BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN selanjutnya pada ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di atur dengan Keputusan Menteri.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan pada pasal 74 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan, ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di-maksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pasal 66 ayat (2) huruf “c.

Hasil temuan penelitian di lapangan menunjukkan :

- 1) Kebijakan Pemerintah memberdayakan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mereka mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dalam kerangka hidup yang berkualitas. Tujuan yang ingin dicapai pemerintah adalah menempatkan masyarakat sekitar hutan lahan sebagai aktor pelaku pembangunan bukan sebagai objek dari berbagai kebijakan dan kegiatan dunia usaha. Masyarakat dapat mengolah sedemikian rupa sumber daya alam lingkungan setempat sehingga sumber daya alam yang mereka eksplorasi atau manfaatkan mempunyai nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan swasta termaktub dalam program CSR yang diwajibkan pemerintah yaitu berupa pembiayaan program sosial yang berasal dari 1 % dari keuntungan perusahaan yang bersangkutan. Tujuannya adalah masyarakat di sekitar lokasi wilayah operasional perusahaan dapat meningkat kesejahteraannya seiring dengan keuntungan dari perusahaan tersebut. Bentuk program CSR dari perusahaan diserahkan sepenuhnya dengan kebijakan perusahaan terkait. Dengan demikian sesungguhnya tujuan kebijakan perusahaan dalam CSR sangat menunjang tujuan kebijakan pemerintah dalam membangun masyarakat perdesaan.
- 2) Isi Kebijakan :
 - a. Kepentingan yang dipengaruhi dalam pemberdayaan masyarakat. Pola pemberdayaan yang dilakukan

pemerintah lebih menggunakan pendekatan top down daripada bottom up. Substansi kebijakan pemerintah cenderung menyeragamkan isi kebijakan daripada upaya mengangkat kearifan lokal. Hal tersebut tidak terlepas dari pola pendekatan CSR, meskipun pendekatannya lebih *soft* dengan masuk melalui pendekatan pembinaan. Namun demikian pendekatan perusahaan swasta lebih cenderung bersifat “*charity*” saja dan tidak berkaitan langsung dengan sumber daya alam setempat atau jenis usaha kesehatan mereka, sehingga masyarakat cenderung teralienasi melalui program mereka. Misalnya beasiswa umum, pengobatan gratis, latihan perbengkelan, dll yang tidak secara langsung berhubungan dengan usaha perkebunan perusahaan.

- b. Tipe manfaat yang diinginkan. Manfaat yang diinginkan dari kebijakan Pemerintah bertipe mendorong (*drive*) kreatifitas masyarakat menuju kemandirian dalam mengolah sumber daya alam setempat. Manfaat yang diinginkan dari Kebijakan Perusahaan swasta adalah *charity*, membantu masyarakat dalam mengatasi kehidupan rutin sehari-hari.
- c. Derajat perubahan yang akan dicapai. Perubahan yang dicapai dari kebijakan pemerintah sangat lambat dan cenderung muncul sikap ketergantungan kepada pemerintah, sedangkan derajat perubahan yang dicapai oleh kebijakan CSR bersifat insidental, yaitu membantu menyelesaikan masalah kehidupan saja. Derajat perubahan yang diperoleh dari kedua kebijakan tersebut sangat kecil dan bias karena tidak mengangkat hakekat kelemahan masyarakat yaitu pemberdayaan dalam mengolah

- sumberdaya yang menjadi mata pencarian mereka yaitu mengolah sumber daya alam yang mereka miliki.
- d. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan Pemerintah ada di Bupati, sedangkan kebijakan CSR pengambilan keputusannya ada di Pemilki atau pimpinan perusahaan.
 - e. Pelaksana program yang telah ada. Program yang dilakukan oleh pemerintah bersifat rutin dilakukan oleh Camat beserta stafnya yang didukung oleh Kepala Desa, sedangkan program yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan oleh petugas perusahaan terkait.
 - f. Sumber daya yg dilibatkan selama ini. Sumber daya yang dilibatkan selama ini oleh Pemerintah sebagai implementasinya adalah aparat Pemerintah dalam instansi terkait (bisa didukung oleh instansi teknis), sedangkan sumber daya yang dilibatkan dalam CSR adalah petugas perusahaan itu sendiri bekerjasama dengan institusi pendukung tergantung dengan kebutuhan program seperti sekolah, Puskesmas/ Rumah sakit, unit-unit teknis swasta untuk pelatihan keterampilan.
- 3) Konteks Implementasi (existing)
- a. Kekuasaan, kepentingan, dan Strategi aktor yg terlibat. Dalam implementasi kebijakan pemerintah segenap aparat pimpinan kecamatan dan desa terlibat secara proporsional sesuai dengan Term of reference (TOR) masing-masing kegiatan kebijakan. Kepentingan pengembangan kemampuan masyarakat menjadi fokus tindakan dengan melibatkan aktor sosial seempat secara saling mendukung (sinergis). Dalam kebijakan perusahaan swasta, pimpinan implementasi kebijakan adalah Bagian Humas dengan tujuan agar masyarakat mendapat kesan “kebaikan” (charity) dari perusahaan sehingga diharapkan masyarakat mengayomi dan mendukung kegiatan core business perusahaan.
 - b. Karakteristik lembaga. Seluruh Unit institusi dari lembaga pemerintah terkait mulai dari instansi Pemkab, Kecamatan, sampai ke Pemerintah Desa terlibat secara proporsional, sehingga memunculkan karakter kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasional secara global. Dari pihak swasta karakteristik yang menonjol adalah upaya untuk melindungi usaha perusahaan dari gangguan masyarakat yang merasa cemburu terhadap keberadaan perusahaan di tempat tersebut, sehingga citra “charity” dari perusahaan lebih menonjol daripada upaya untuk masyarakat menjadi mandiri.
 - c. Kepatuhan dan daya tangkap implementor dan sasaran. Para aparatur pemerintah patuh terhadap program kerja yang telah ditetapkan oleh kebijakan terkait. Implementor melaksanakan tugas sebagaimana peran dan fungsi yang telah ditetapkan untuk unit kerjanya secara rutin (job description). Sasaran kegiatan jelas sebagaimana ditetapkan dalam program masing-masing yaitu masyarakat desa tertentu. Para aparatur kegiatan CSR dari perusahaan melaksanakan kegiatan CSR dibebankan kepada Bagian Humas masing-masing yang implementasinya dipimpin oleh mereka meskipun melibatkan pihak terkait lain dengan sasaran komunitas masyarakat, yaitu masyarakat yang terkumpul dalam ciri tertentu misalnya, ibu-ibu PKK, remaja, anak sekolah, lingkungan, dll.
- 4) Program aksi dan proyek individu yang di *design* dan dibiayai. Program aksi dalam kegiatan kebijakan pemerintah

termaktub dalam kegiatan unit kerja Pemkab, Ke-camatan, atau pemerintah Desa, berdasar-kan visi dan misi pemerintah yang telah ditetapkan. Wadah kebijakan tersebut tercakup dalam APBD, APBN, dan kegiatan pembangunan institusi, yang secara makro masuk ke dalam rencana strategis pembangunan nasional dan daerah. Kegiatan kebijakan perusahaan swasta merupakan program aksi insidental yang terangkum dalam rencana kegiatan tahunan perusahaan sesuai dengan persentase keuntungan perusahaan tersebut setiap tahun berjalan yang dibiayai oleh anggaran tahunan perusahaan yang bersangkutan.

- 5) Hasil kebijakan dan dampak pada masyarakat dan individu. Hasil kebijakan dan dampak pada masyarakat dan individu dari kedua kebijakan tersebut cenderung sama yaitu kecil sekali dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan menyeluruh, namun untuk perorangan individu terutama yang berkaitan dengan keterampilan dan kesehatan lingkungan berdampak positif meskipun juga relatif sedikit.
- 6) Perubahan dan penerimaan masyarakat yang terjadi. Masyarakat penerima kebijakan yang diterapkan kepada mereka dengan baik dan sangat antusias sebagai upaya mengangkat derajat kesejahteraan.

Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya model pemberdayaan masyarakat yang efektif adalah model yang mensinergiskan model kebijakan struktural kekuasaan (*top down*) dengan pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*) yang merupakan aplikasi strategi yang berdasarkan kepada upaya mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan dan sosial budaya serta kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi di lapangan. Faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal peluang dan tantangan dari situasi

yang dihadapi harus dirumuskan untuk mendapatkan keadaan nyata (*existing*) yang faktual dalam melihat kemampuan yang utuh.

Dengan demikian CSR diarahkan untuk memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri di kawasan operasinya dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholders* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya sehinggamampu ber-adaptasi dengan lingkungan, komunitas, dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan program-program CSR selayaknya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainability development*) dengan mengedepankan pertumbuhan kemampuan mandiri pada masyarakat dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Karena itu kebijakan tiga *stakeholders* terkait dalam pembangunan masyarakat desa yaitu perusahaan, pemerintah dan masyarakat, seyogyanya mempunyai program kebijakan pembangunan yang sinergis agar kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan harmonis.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang merupakan bagian dari strategi kebijakan pembangunan desa yang selama ini dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi dua skema yaitu skema pemerintah kabupaten dan skema perusahaan melalui kewajiban untuk melakukan program CSR. Kedua kebijakan ini berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak mencapai target peningkatan

kesejahteraan secara signifikan. Kedua skema tersebut cenderung menganut model top-down se-hingga kurang didukung oleh masyarakat secara optimal.

Efektifitas model pembangunan masyarakat sekitar hutan seyogyanya memperhatikan kondisi existing wilayah lokal dalam paradigma modernisasi upaya pencapaian target pembangunan secara terpadu. Model Sintesis merupakan alternatif strategi yang selaras dengan karakteristik Sistem Pembangunan Nasional Indonesia karena memadukan model *Top-down dengan Bottom up* sehingga Sistem Pembangunan Nasional akan mengandung sistem pembangunan lokal secara sinkronis dan harmonis menuju target pencapaian pembangunan nasional yang memperhatikan kearifan lokal. Wujud konkrit dari model ini diawali dengan pembentukan infra struktur berupa lembaga pelaksana yaitu Badan Pembangunan Masyarakat Desa sebagai bagian dari Unit Kerja Pemerintah Kabupaten. Lembaga ini sebagai unit kerja yang memperkuat keberadaan unit kerja pemerintah yang sudah ada sekarang yaitu Dinas Pembangunan Masyarakat Desa dengan paradigma revitalisasi dan refungsionalisasi.

B. Saran

Dari analisis terhadap temuan lapangan beberapa saran yang direkomendasikan :

- 1) Model pembangunan masyarakat hutan yang diterapkan saat ini sebaiknya ditinjau kembali dengan memperhatikan keunikan sasaran dengan tidak menyamakannya dengan model pembangunan desa pada umumnya di Indonesia.
- 2) Pelibatan perusahaan swasta yang mempunyai wilayah usaha kerja (*business*) di sekitar hutan setempat sangat diperlukan dalam perancangan program-program pembangunan desa setempat.
- 3) Program CSR yang diwajibkan kepada perusahaan swasta setempat harus diharmonisasikan sebagai elemen terkait pada rencana pembangunan desa di sekitar hutan industri terkait.

- 4) Aspirasi dan kebutuhan masyarakat sekitar hutan perlu dipadukan dalam rencana pembangunan desa secara umum dari pemerintah, sehingga menciptakan harmonisasi yang saling mendukung dalam program-program kerja yang terancang menuju target pembangunan yang jelas.
- 5) Ada kerjasama dan koordinasi yang solid antara petugas pembangunan pemerintah dengan petugas CSR dari perusahaan terkait dalam implementasi program pembangunan yang sudah ditetapkan.

Badan Pembangunan Desa atau unit kerja pemerintah yang berwenang dalam pembangunan desa menjadi komando utama dalam mensinkronisasi dan mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan desa yang telah ditetapkan dalam APBD dan program CSR.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 2007. Ilmu dan Aplikasi Pendidik. Bandung : Pedagogiana Press.
- Ihsan, Moh Mustofa. 2015. Ketahanan Masyarakat Desa. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press
- Jemadi, 2013. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Jurnal Maksipreneur Vol III Th 2014.
- Kartasmita, Ginanjar. 1997. Pembelajaran Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. Yogyakarta : UGM.
- Ley, Cornelis (editor). 2007. Membangun NKRI dari Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah. Yogyakarta : JIP UGM.

Pasolong, Harbani.2007.*Teori Administrasi Publik*.Bandung:Alfabeta.

Saptawan, Ardiyan, Ermanovida, Indra Yustian. 2017. Strategi Pengendalian Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil Penelitian.

Saptawan, Ardiyan, Muhammad Ammar, dan Retno Susilowati. 2018. Model Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kerjasama pemerintah dengan perusahaan. Hasil Penelitian. Indralaya : Unsri

Widjajanti, Kesi, 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Pembangunan Ekonomi, Vol 12 Th 2011.